

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi disetiap daerah menuntut pemerintah untuk menjalankan roda ke pemerintahannya dengan tata kelola yang baik (*good governance*). Karakteristik utama dalam menyelenggarakan *good governance* meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Berdasarkan UU RI Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal terpenting dalam menjalani otonomi daerah, pemerintah harus mampu mengelola dengan baik atas keuangan dan aset yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai visi dan misi daerahnya. Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen pemerintah daerah kepada pemangku kepentingan yang ada dengan kondisi keuangan pemerintah daerah. Keharusan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu indikator kualitas laporan keuangan yang berkualitas yaitu opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan.

Berdasarkan IHPS Tahun 2019 atas opini LKPD setiap tahunnya cenderung meningkat. Perkembangan opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir, dari semula 47% menjadi 82%. Adapun rincian persentase perkembangan opini LKPD dari 2014-2018 sebagai berikut:

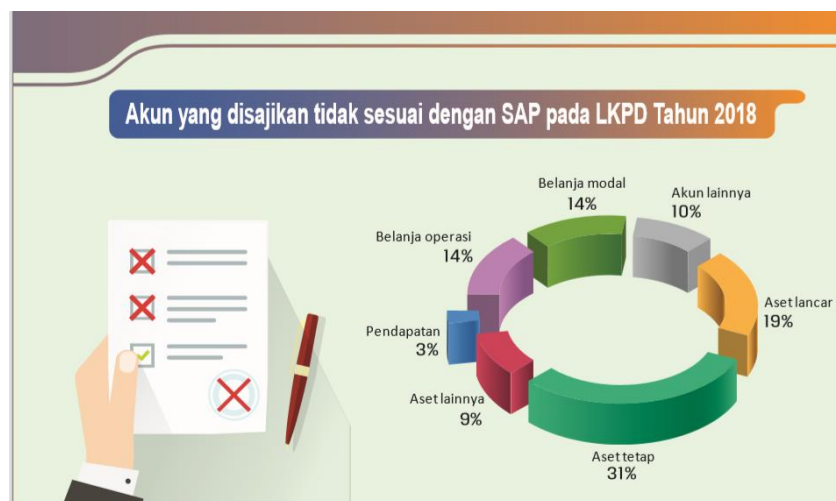
Tabel 1.1 Persentase Perkembangan Opini LKPD

LKPD Tahun	Opini			
	WTP	WDP	TMP	TW
2014	47%	46%	6%	1%
2015	58%	36%	5%	1%

2016	70%	26%	4%	0
2017	76%	21%	3%	0
2018	82%	16%	2%	0

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019

Adanya kenaikan pada persentase opini WTP dan penurunan persentase opini WDP tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan perbaikan kualitas pemerintah daerah dalam penyajian laporan keuangan. Dengan adanya peningkatan tersebut, tidak menutup kemungkinan masih terjadinya permasalahan yang dialami. Masih terdapat beberapa akun yang tidak disajikan sesuai dengan SAP pada LKPD tahun 2018. Berikut ini merupakan persentase akun yang tidak disajikan sesuai dengan SAP :



Gambar 1. 1 Persentase Akun yang disajikan tidak sesuai SAP

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019

Berdasarkan data tersebut, aset tetap masih menjadi akun yang sering dijumpai pada setiap daerah sehingga menjadi permasalahan tertinggi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan pencatatan aset tetap belum dilakukan atau tidak akurat, aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai, serta terdapat

lasha Nastitie, 2020

PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENATAUSAHAAN ASET TETAP SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penambahan aset tetap setelah perolehan belum diatribusikan ke aset induk sehingga berdampak pada perhitungan akumulasi penyusutan.

Pemerintah Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang diawasi dalam penyusunan laporan keuangannya. Pada tahun 2017 dalam laporan keuangan menyajikan aset senilai Rp 694,68 miliar tetapi tidak berdasarkan nilai perolehannya (Republika.co.id 01/06/2018).

Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 36B/LHP/XVII.BDG/05/2019 permasalahan aset tetap yang menjadi pengecualian dalam opini LKPD tahun 2017

Tabel 1.2 Rincian Permasalahan Aset Tetap Kota Bandung tahun 2017

No	Permasalahan	Aset yang terpengaruh	Jumlah Data	Nilai (Rp)
1.	Kewajaran Penilaian Aset tahun 1900, 2005, dan 2007	Tanah	46	85.795.977.033,00
		Gedung dan Bangunan	2178	418.530.617.681,00
		Jalanan Irigasi dan Jaringan	1.110	190.363.400.916,00
		Sub Jumlah (1)		694.689.995.630,00
2.	Daftar Rincian Aset tanpa Informasi Lengkap Sehingga Diragukan Keberadaannya	Tanah	20	66.131.852.400,00
		Peralatan dan Mesin	545	105.293.063.520,50
		Gedung dan Bangunan	672	47.620.360.605,00
		Jalan Irigasi dan Jaringan	577	106.436.737.973,00
		Sub Jumlah (2)		325.482.014.498,50

3.	Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak berada dalam penguasaan Pemerintah Kota Bandung	Peralatan dan Mesin	68	2.929.560.310,00
4.	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tidak diketahui keberadaan (berdasarkan hasil cek fisik)	Peralatan dan Mesin	607	102.183.289.909,00
5.	Tanah PSU Belum Disajikan	Tanah		
Jumlah (1+2+3+4+5)				1.125.284.860.347,50

Sumber: LHP BPK-RI, Nomor: 36B/LHP/XVIII.BDG/05/2019

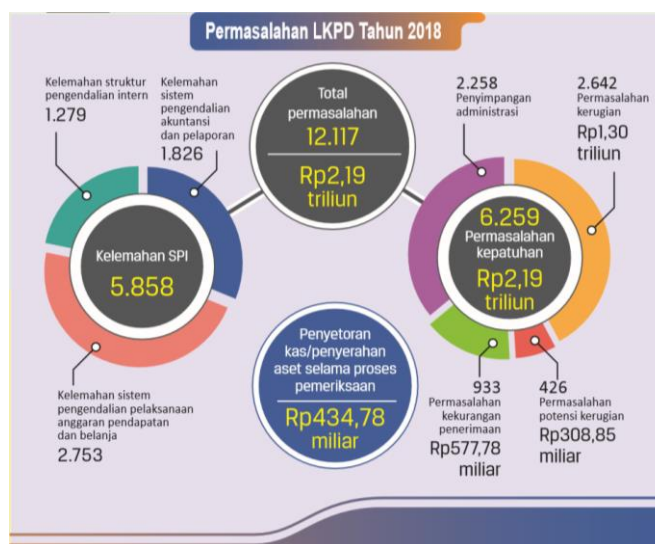
Adapun temuan hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2018 atas aset tetap Pemerintah Kota Bandung yang tercantum dalam LHP BPK-RI atas SPI tahun 2019, diantaranya:

1. Penggunaan Aset Tetap Tanah Milik Pemkot Bandung oleh Instansi Vertikal Tidak Sesuai dengan Ketentuan
2. Pinjam Pakai kendaraan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Lembaga Veteran RI Kota Bandung belum sesuai ketentuan
3. Aset tetap peralatan dan mesin tidak berada dalam Penguasaan pemerintah Kota Bandung sebesar Rp1.782.792.144,00
4. Hibah dari Kementrian belum dicatat dalam KIB Dinas Pendidikan

5. Pencatatan Aset tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) belum akurat dan tidak informatif
6. Beberapa bidang tanah milik Pemerintah Kota Bandung dikuasai oleh pihak lain
7. Aset tetap gedung dan bangunan dikuasai oleh pihak lain/sengketa dengan pihak lain
8. Pengamanan Aset tetap tanah belum memadai
9. Pengamanan Dokumen kepemilikan aset tetap peralatan dan mesin pada Pemerintah Kota Bandung belum memadai
10. Aset yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat
11. Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) mangkrak tanpa ada kejelasan kelanjutan
12. Aplikasi SIMDA BMD Versi 10.7.2 belum handal dalam penyusunan laporan keuangan.

Hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi dalam penatausahaan BMD. Dalam Permendagri No. 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh lainnya yang sah, sehingga dikatakan bahwa seluruh aset daerah yang berwujud merupakan bagian dari Barang Milik Daerah. Peran aset tetap sangat besar dalam organisasi atau perusahaan yang dapat ditinjau dari segi fungsinya, jumlah dana yang diinvestasikan, pengelolaannya, maupun pengawasannya (A. Halim & Kusufi, 2014). Aset merupakan modal terpenting bagi pemerintah dalam pencatatannya di posisi laporan keuangan. Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan pengelolaan aset dengan efektif dan efisien, yang dimana salah satu didalamnya melaksanakan penatusahaan aset sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah daerah itu sendiri maupun sektor lain. Tertib dalam penatausahaan aset dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Aset daerah yang tertib, efektif, dan optimal.

Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penatausahaan aset yang dilakukan dalam lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kelemahan atas penatausahaan aset salah satunya disebabkan oleh Pengendalian Intern yang dinilai masih bermasalah. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan menunjukkan total permasalahan LPKD Tahun 2018 sebanyak 12.117 yang diantaranya kelemahan struktur pengendalian intern sebesar 1.279. Permasalahan kelemahan SPI tersebut terjadi karena adanya kelemahan pengendalian dalam pengelolaan aset tetap sehingga dalam pencatatannya belum dilakukan atau tidak akurat yang terjadi pada 472 pemda.



Gambar 1.2 Permasalahan LKPD Tahun 2018

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern salah satu tujuannya yaitu pengamanan atas aset yang dimiliki oleh pemerintah. Untuk dapat meminimalisir kelemahan dalam penatausahaan aset tetap, maka diperlukannya pengendalian intern yang baik pada masing-masing SKPD sehingga mampu meraih laporan keuangan yang berkualitas baik. Pengelolaan aset yang kurang baik, akan mendatangkan kerugian bagi pemerintah atas biaya yang

lasha Nastitie, 2020

PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENATAUSAHAAN ASET TETAP SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dikeluarkan dari pemeliharaan aset. Hal tersebut berdampak pada terjadinya ketidakseimbangan antara anggaran yang dikeluarkan dengan pendapatan yang didapatkan.

Penelitian mengenai Pengendalian Intern sudah banyak diteliti dengan subjek dan objek penelitian yang berbeda-beda oleh peneliti sebelumnya. Pada penelitian yang telah dilakukan yang dilakukan oleh Syukriy Abdullah, Darwanis, (2017) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap manajemen aset pada Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Haryadi, & Arum, (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Supiarti, (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan barang milik negara. Penelitian yang dilakukan oleh Maulina & Fatmi, (2018) menyatakan bahwa efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah berdampak lemah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Anshari & Sofyan (2016) menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Pradipa & Munidewi (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern secara langsung tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Faishol (2016) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta, Lambey, & Pontoh (2017) yang menunjukkan bahwa SPI berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adanya inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali terkait pengendalian intern.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek dan subjek penelitian, dimana dalam penelitian ini menggunakan kualitas laporan keuangan, penatausahaan aset tetap, dan pengendalian intern sebagai objek penelitiannya dan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Pemerintah daerah Kota Bandung dipilih sebagai subjek penelitian

dikarenakan adanya fenomena atas penatausahaan aset yang kurang baik yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sehingga akan berimplikasi pada kualitas laporan keuangan. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada periode waktu penelitian yang digunakan dengan penelitian sebelumnya. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Penatausahaan Aset Tetap serta Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Bandung)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, perumusan masalah penelitian ini memfokuskan pada pengaruh pengendalian intern terhadap pengelolaan aset tetap serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung. Berikut ini pertanyaan secara lebih rinci dalam perumusan masalah penelitian ini :

1. Bagaimana pengaruh Pengendalian Intern terhadap Penatausahaan Aset Tetap di Pemerintah Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Penatausahaan Aset Tetap sebagai variabel *intervening* di Pemerintah Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Penatausahaan Aset Tetap di Pemerintah Kota Bandung
2. Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Bandung

3. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Bandung
4. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Penatausahaan Aset Tetap sebagai variabel *intervening* di Pemerintah Kota Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan menambah wawasan bagi para peneliti mengenai pengaruh pengendalian intern terhadap penatausahaan aset tetap serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk dapat memperdalam pengetahuan mengenai penatausahaan aset tetap di pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta lebih peka terhadap isu-isu yang terjadi baik teori maupun praktiknya.

2. Bagi Pemerintah Kota

Sebagai rujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan aset tetap pemerintahan mengenai pengendalian intern dalam pengelolaan aset tetap agar dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga terhindar dari potensi penyimpangan yang nantinya akan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan pemerintahan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan isu-isu yang berhubungan serta sebagai bahan referensi penelitian dengan topik yang sama.